

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1985). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2008). Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1998). Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Badan Kepegawaian Negara. (2019). TPP dan Sistem Remunerasi ASN. Jakarta: BKN.
- Badan Kepegawaian Negara. (2021). Pedoman TPP ASN dan Keterkaitannya dengan APBD Daerah. Jakarta: BKN.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2021). Pedoman Teknis Penetapan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian PAN-RB. (2020). Pedoman Remunerasi ASN di Daerah. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.
- Manullang. (2018). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Santoso, Lukman. (2015). Hukum Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani. (2005). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Terry, George R. (2012). *Principles of Management*. New York: McGraw-Hill.
- Zaidan, Abdul Karim. (2006). *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zuhaili, Wahbah az-. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Hakim, Bawon Nur. (2019). *Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD*. Stikes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan.
- Kamila, Mutiah. (2014). *Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kota Balikpapan*. E-Journal Ilmu Pemerintahan.
- Restu, Praska Gian. (2018). *Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD dalam Bidang Pendidikan*.
- Setyawan, Idris. (2016). *Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap APBD 2018–2019*. Universitas Semarang.
- Suwardi, Dedy. (2018). *Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan APBD*. UIN Raden Intan Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2022). *Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian TPP ASN*.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024*.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2023). *Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024*.

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2024). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2024). Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2024). Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Pedoman Pemberian TPP ASN.

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2025). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Pemerintah dan Sumber Internet

Fraksi PKS DPRD Kuningan. (2025). APBD Perubahan Kuningan 2024: Sorotan PAD dan Belanja Modal. Diakses dari: <https://fraksipkskuningan.id/>

JDIH DPRD Kabupaten Kuningan. (2024). APBD 2024 Kuningan Resmi Ditetapkan. Diakses dari: <https://jdih.dprdkuningankab.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2024). Belum Dibayarkan TPP Tiga Bulan. Diakses dari: <https://kuningankab.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2025). Realisasi Pembayaran TPP ASN. Diakses dari: <https://kuningankab.go.id/>

Dokumen KUA-PPAS Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024.

Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

Dokumen Rincian APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Daftar Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Kuningan Tahun 2024.